## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

Andi, H. (2016). korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan. Akademika Pressindo.

Bj, abdul muis. (2021). pemberantasan korupsi. pustaka reka cipta.

Brigham joel. (2015). Dasar-dasar manajemen keuangan. 4.

Chairudin dkk. (2017). strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. pt.reflika aditama.

Chazami, A. (2016). hukum pidana korupsi di indonesia.

Djoko Prakoso. (2016). Hukum Asuransi Indonesia. Bina Aksara.

felicia edbert. (2022). KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. IV.

Hamzah, A. (2016). perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara. sinar grafika.

Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. 21.

Kapitan, J. T. (2019). Status Krprmilikan Perusahaan BUMN. 12.

Kuffa, H. (2015). Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum. UMM Press.

Laila Kholis. (2012). *Pembayaran Uang pengganti dalam perkara korupsi*. Solusi Publishing.

Lubis Sabrina. (2024). Memahami Dari Kerugian Negara.

martiman prodjohamidjojo. (2010). pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. pradnya pramita.

Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana. PT. Citra Aditya BAkti.

Rukmini, M. (2014). aspek hukum pidana dan kriminologi.

Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Sudarto. (2017). kapita selekta hukum pidana.

sudikno mertokusumo. (2014). penemuan hukum.

Yahya Harahap. (2007). Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan. jakarta Ghalia.

Yanto, O. (2020). Negara hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. pustaka reka cipta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## C. Sumber Lain

- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132. <a href="https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792">https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792</a>
- Iza Sadzili. (2024). Status Badan Usaha Milik Negara Terhadap Anak Perusahaan Holding BUMN. *Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Khalid, A. (2014). Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940. *Al' Adl*, *VI*(11), 53–68.
- Meidi Yanto Sandi. (2023). Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Badan usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk persero. *Nolaj*, 2(1).